

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Badu, S. Q., & Djafri, N. (2017). KEPEMIMPINAN DAN PERILAKU ORGANISASI. In *IDEAS PUBLISHING* (Vol. 9, Issue 4). IDEAS PUBLISHING. <https://doi.org/10.25077/jfu.9.4.517-523.2020>
- Darmanah, G. (2019). *Metodologi Penelitian*. CV. HIRA TECH.
- Dwimawanti, ida hayu. (2004). Kualitas Pelayanan Publik (Salah Satu Parameter Keberhasilan Otonomi Daerah). *Dialogue JIAKP*, 1, No. 1, 109–116. <http://eprints.walisongo.ac.id/3684/>
- Furqoni, M. (2015). Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya*, 1–12.
- Handayani, V. (2017). Hubungan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan dengan Partisipasi Politik dalam Pemberian Suara pada PILKADA Serentak Tahun 2015 di Desa Mamahak Besar Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 5(4), 491.
- Haryono, H., & Eko Pujiyanto, W. (2013). Upaya Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kantor Kecamatan Gedangan. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 1, No.1(1), 43. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v1i1.426>
- Hasjimzum, Y. (2014). Model Demokrasi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Otonomi Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Reformasi). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 445–457. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.310>
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*.
- Katuuk, F. (2015). *Efektivitas Kinerja Aparat Pemerintah Dalam Pelayanan Publik Di Desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara*. 1–14.
- Maani, K. D. (2005). Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. *Demokrasi*, IV(2), 25–34.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 21(2), 1–18. <https://doi.org/10.31845/jwk.v21i2.133>
- Nancy, J. (2015). perilaku birokrasi dalam pelayanan publik(studi kasus:pada

badan perizinan terpadu dan penanaman modal/BPTM) DI Kota Makassar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Nurdin, I. (2019). Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik). In *Media Sahabat Cendekia*.

Oktavianto, D. A. (2008). *Penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten kodus (studi kasus layanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2007)*.

Rohayatin, T., Warsito, T., Pribadi, U., Nurmandi, A., Kumorotmo, W., & -, S. (2018). Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Caraka Prabhu*, 1(01), 22–36. <https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.50>

Sellang, K., Ahmad, J., & Mustanir, A. (2019). Strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. *CV. Penerbit Qiara Media, August*, 1–168. [https://play.google.com/store/books/details/Kamaruddin\\_Sellang\\_S\\_Sos\\_M\\_AP\\_STRATEGI\\_DALAM\\_PENIN?id=U06rDwAAQBAJ](https://play.google.com/store/books/details/Kamaruddin_Sellang_S_Sos_M_AP_STRATEGI_DALAM_PENIN?id=U06rDwAAQBAJ)

Sembiring, Benny Kurniawan Putra, Heri Kusmanto, and U. T. (2016). Perilaku Aparat Birokrasi dalam Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 97–106.

Zega, Y. (2018). Analisis Penerapan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 1(2), 108–112.

### **Undang-Undang dan Sumber Lain**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus <https://kuduskab.bps.go.id/> Diakses pada 4 Januari 2022

Media sosial *instagram* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus (@dukcapilkudus)

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Nomor 067.1/0344.1/14.00/2020 tentang Standar Pelayanan (SP) Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 63 Tahun 2003 <https://www.menpan.go.id/site/> Diakses pada 20 Oktober 2021

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

[www.dukcapil.kuduskab.go.id](http://www.dukcapil.kuduskab.go.id) Diakses pada 27 Oktober 2021